CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

URGENSI PEMERIKSAAN KEUANGAN SUATU ORGANISASI SERTA LEMBAGA OLEH AUDITOR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hanna Stephanie
Universitas Bandar Lampung
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email : hannastephanie84@gmail.com

ABSTRACT

We can encounter cases of corruption anywhere and at any time, humans commit acts of corruption to fulfill their own benefits and will never be satisfied with what they have achieved. Corruption often occurs in various places, namely in the business and non-business sectors, both private and state, which have enormous potential for committing criminal acts of corruption because they deal with money and cooperation between people. The current situation is that many business and non-business actors experience distortions in their performance, which ultimately leads to a decrease in work ethic and losses for an installation. Prevention that can be taken by both business and non-business institutions is carrying out audits or checking financial reports to ensure that the information presented is in accordance with the report written. Through an audit of financial reports, financial records can be checked. If there is any manipulation, it is the audit's job to reveal it. However, ultimately the effectiveness of audits in minimizing corruption depends on the integrity of the auditor, the independence of the audit process, and the follow-up to audit findings. If audit findings are not followed up or left as they are, their impact on preventing corruption can be reduced.

Keyword: *Corruption; Audit; Institutions; Fraud*

ABSTRAK

Kasus korupsi bisa kita temui di mana saja dan kapan saja, manusia melakukan tindak korupsi untuk memenuhi keuntungan dirinya sendiri dan tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dicapai. Korupsi banyak terjadi di berbagai tempat yakni di bidang bisnis maupun non bisnis baik swasta maupun negri, yang memiliki potensi sangat besar untuk melakukan tindak pidana korupsi karena berurusan dengan uang dan kerjasama antar sesama. Situasi yang terjadi saat ini, banyak para pelaku bisnis dan non bisnis mengalami distorsi dalam kinerja mereka, yang pada akhirnya menimbulkan turunnya etos kerja dan kerugian

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

bagi sebuah instalasi. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh lembaga baik bisnis maupun non bisnis yakni melakukan tindak Audit atau pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan informasi yang disajikan sesuai dengan laporan yang ditulis. Melalui audit laporan keuangan bisa diperiksa catatan keuangannya, jikalau ada manipulasi pun maka tugas auditlah yang mengungkap. Namun pada akhirnya efektivitas audit dalam meminimalkan korupsi memiliki ketergantungan pada integritas si auditor, independensi proses audit, dan tindak lanjut atas temuan audit. Apabila temuan audit tidak ditindaklanjuti atau dibiarkan begitu saja maka dampaknya terhadap pencegahan korupsi bisa berkurang.
Kata Kunci: Korupsi; Audit; Lembaga; Kecurangan

I. PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.[1] Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).[2] Tindak Korupsi adalah perbuatan yang sangat buruk dan merugikan banyak pihak baik instalasi, perseorangan maupun kesepakatan antara 2 orang atau lebih. Memiliki banyak sekali tindakan di dalamnya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, memalsukan laporan keuangan, mengambil hak milik orang lain, mengutamakan keluarga terlebih dahulu dalam sebuah jabatan di instalasi serta memanipulasi lingkungan sekitarnya.

Permasalahan etika ada di mana-mana dan di setiap instalasi. Suatu instalasi tentu memiliki seperangkat etikanya sendiri, yang digunakan untuk mengatur kehidupan di dalam instalasi tersebut. Namun, mempraktikkan etika bukanlah tugas yang mudah. Karena kita perlu melihat secara kritis prinsip-prinsip dasar kita, menganalisisnya dengan jelas, dan mencoba memperbaikinya dengan cara memperbaikinya. Etika menjadi akar dalam perilaku serta kehidupan pribadi maupun sekelompok orang di dalam suatu instalasi, melembaga dalam peraturan menjadi budaya organisasi yang diyakini oleh seluruh karyawan instalasi, dan secara sistematis mengatur hubungan timbal balik antara orang-orang dalam instalasi tersebut dengan orang lain suatu kebutuhan. Budaya organisasi ini memastikan korupsi dan tindakan asusila lainnya dapat dicegah secara sistematis dan terukur.

Dalam prosesnya, prinsip-prinsip etika harus dipatuhi dan diadopsi oleh setiap anggota. Etika juga berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan standar yang terpadu, sehingga menghindari kesenjangan dalam moralitas. Secara sederhana, etika dapat didefinisikan sebagai

[1] Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, hlm. 7.

[2] WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

metode pelaksanaan kegiatan operasional yang mencakup semua aspek, baik individu maupun masyarakat. Semua aspek tersebut terkait dengan perjalanan kegiatan, yang dijalankan dalam kerangka keadilan berdasarkan norma dan hukum, tanpa ketergantungan pada kedudukan individu atau kelompok dalam masyarakat.

Faktor risiko kecurangan dalam standar kecurangan seperti SAS 99, ISA 240, TSAS 43, dan Pernyataan Standar Akuntansi No. 70 didasarkan pada teori segitiga kecurangan yang diperkenalkan oleh D. R. Cressey pada tahun 1953. Menurut Cressey, dalam setiap kegiatan kecurangan selalu ada tiga kondisi utama yang hadir: tekanan atau motif, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam penelitian Lou dan Wang (2009), ketiga kondisi ini dianggap sebagai elemen kunci yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Standar-standar tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kecurangan dengan memahami bagaimana tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berperan dalam kegiatan kecurangan.[3] Tekanan/motivasi adalah motif yang mendorong orang berbuat curang karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam urusan keuangan, perilaku berjudi, upaya untuk mengalahkan sistem, ketidakpuasan kerja, dan lain-lain. Tekanan/motivasi ini sebenarnya hadir dalam dua bentuk: nyata (langsung) dan dirasakan (tidak langsung). Format merupakan tekanan nyata yang ditimbulkan oleh situasi kehidupan nyata pelaku yang mendorong terjadinya kecurangan.

Dalam karya Utari (2011) yang dikutip oleh Siregar (2017), disebutkan bahwa perilaku korupsi dapat muncul dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya aspek moral, seperti kurangnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu, serta pola hidup konsumtif dan pengaruh keluarga. Sedangkan faktor eksternal mencakup aspek ekonomi, seperti pendapatan yang tidak mencukupi, aspek politik seperti ketidakstabilan dan kepentingan politik, serta aspek manajemen dan organisasi yang buruk karena kurangnya transparansi. Faktor eksternal lainnya termasuk lemahnya penegakan hukum dan lingkungan sosial yang kurang mendukung tindakan antikorupsi. Di Indonesia, istilah fraud umumnya dikenal sebagai korupsi, sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, fraud diidentifikasi sebagai korupsi.[4]

Di hadapan tantangan fraud, perusahaan atau institusi wajib membangun sistem pengendalian internal yang kuat. Pengawasan melalui audit di perusahaan sangat penting untuk membantu pemerintah atau institusi meminimalisir kelemahan, kesalahan, dan risiko kecurangan. Jika sistem investigasi audit lemah, ini dapat mengindikasikan operasi perusahaan yang tidak efisien dan membuka peluang terjadinya fraud. Masalah fraud masih terjadi hingga kini, tanpa adanya institusi atau lembaga yang sepenuhnya kebal terhadapnya. Penipu dapat ditemukan di semua tingkatan angkatan kerja, baik di posisi atas maupun bawah. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan data pribadi dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko penipuan. Untuk memperkuat sistem pengendalian internal, perusahaan harus mengimplementasikan teknologi

[3] Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. 2017. *Para Pelaku Fraud Di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia*. Buletin Ekonomi Feuki Issn-14103842 Vol, 21, 50-58.

[4] wulandari, a., putri, m. e., & marlina, y. 2021. *Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi ummi, 1 (2), 66-82.

terbaru dan pelatihan berkelanjutan bagi staf mereka. Selain itu, transparansi operasional dan penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mencegah tindakan kecurangan. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkunga n yang lebih aman dan terpercaya, serta mengurangi peluang terjadinya kecurangan di semua tingkatan organisasi.

Karena tidak ada perusahaan ata u instansi yang sepenuhnya kebal terhadap fraud, maka setiap organisasi diwajibkan membangun sistem pengendalian internal yang kuat. Audit memainkan peran penting dalam membantu perusahaan atau lembaga mengidentifikasi dan meminimalisir kelemahan, kesalahan, dan risiko kecurangan. Audit merupakan kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti kuantitatif terkait entitas tertentu untuk menentukan atau melaporkan sejauh mana kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan oleh individu atau institusi yang kompeten dan independen. Untuk memperkuat sistem pengendalian internal, organisasi harus mengimplementasikan teknologi terbaru serta memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf mereka. Transparansi operasional dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah tindakan kecurangan. Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan budaya kerja yang mengutamakan integritas dan akuntabilitas, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi peluang terjadinya fraud. Dengan demikian, upaya kolektif dalam menjaga integritas sistem operasional dapat lebih efektif dan berkelanjutan.[5]

Sistem investigasi audit yang lemah dapat menyebabkan operasi perusahaan menjadi tidak efisien dan membuka peluang terjadinya fraud. Audit, atau pemeriksaan, dalam arti luas adalah evaluasi yang menyeluru h terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Evaluasi ini dilakukan oleh auditor yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Tujuan utama dari audit adalah untuk memverifikasi bahwa subjek audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Dalam konteks ini, audit berfungsi untuk memastikan bahwa segala aktivitas dan operasi perusahaan dilakukan dengan efisiensi tinggi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Auditor tidak hanya bertugas menemukan dan melaporkan kelemahan dan ketidakpatuhan, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, audit membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah serius.

Investigasi audit biasanya dilakukan di area operasional untuk mendokumentasikan potensi fraud dalam suatu transaksi keuangan. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengkonfirmasi ada tidaknya fraud, memahami besaran selisih, mengidentifikasi kelemahan, dan mengusulkan perbaikan untuk mencegah terulangnya fraud. Ada beberapa langkah yang perlu dipahami saat melakukan survei investigasi, salah satunya adalahuntuk menentukan apakah penipuan benar-benar terjadi atau mungkin (berpotensi) terjadi. Proses ini menuntut audit untuk dapat benar-benar memahami rangkaian peristiwa dan memahami nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan dalamperaturan yang berlaku. Jika suatu insiden telah

[5] Iwan koerniawan, s.E., m.Th., m.Si. Auditing Konsep Dan Teori Pemeriksaan akuntansi, Yayasan Prima Agus teknik, redaksi: Jln majapahit No 605 Semarang 2021, Hlm 8

terjadi atau berisiko terjadi, langkah-langkah berikut dapat membantu audit untuk menentukan apakah lingkungan menyebabkan kerugian atau ketidakadilan terhadap instalasi. Jika terbukti terjadi kerugian atau fraud, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peran atau kontribusi tersebut harus diidentifikasi. Langkah selanjutnya mungkin adalah menentukan aturan apa yang dilanggarnya dan apakah adakaitannya dengan insiden tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

- Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan diatas maka rumusan masalah yang dapat saya angkat dalam artikel ini adalah: Apakah urgensi dalam suatu lembaga untuk diperiksa aliran keuanganny alewat auditor?

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian Kualitatif yang bertujuan untukl memahami proses, persepsi, dan dinamika yang terkait dengan praktik audit dalam berbagai konteks permasalahan yang terjadi. Peneliti mengeksplorasi praktik audit secara mendalam pada satu atau beberapa entitas (perusahaan, organisasi, atau instansi pemerintah). Wawancara mendalam dengan auditor, auditee, manajer, atau orang di bidang keuangan dengan kepentingan yakni membantu menggali persepsi dan pandangan terkait proses audit. Wawancara dapat memberikan wawasan tentang pengalaman praktis, kendala, dan keefektifan audit dari sudut pandang berbagai pihak. Metode ini cocok untuk mempelajari budaya audit dalam suatu instalasi. Peneliti dapat mengamati dan mencatat bagaimana budaya instalasi mempengaruhi proses audit, termasuk etika, kebiasaan, dan nilai yang mendasari praktik audit. Sehingga praktek fraud bisa diatasi dan ditindaklanjuti.

IV. HASIL & PEMBAHASAN

A. Apakah penting dalam suatu lembaga untuk diperiksa aliran keuangannya lewat auditor?

Laporan keuangan merupakan elemen yang sangat penting dan wajib bagi berbagai sektor, termasuk bisnis, organisasi, sektor publik, keuangan dan perbankan, pasar modal, pendidikan, serta perpajakan. Kesehatan dan kelancaran operasional suatu usaha dapat dilihat dari laporan keuangannya. Namun, masih banyak yang mengabaikan pentingnya laporan keuangan dan tidak menyadari manfaat serta fungsi penting yang dimiliki oleh laporan tersebut. Hal ini termasuk pengabaian terhadap standar laporan keuangan yang seharusnya diterapkan secara konsisten.[6] Jikalau hal ini dibiarkan maka instalasi yang telah berdiri dan dirintis itu akan berantakan lantaran tak memiliki tanpa panduan yang jelas, para investor tidak dapat menilai kinerja sebuah instalasi. Laporan keuangan perusahaan pada dasarnya disusun oleh setiap perusahaan. Di perusahaan yang telah menerapkan pengendalian internal, laporan keuangan akan diaudit oleh kantor akuntan publik, meskipun perusahaan tersebut bukan perusahaan publik. Kesadaran akan pentingnya audit ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan.

[6] Sari, P. A., & Hidayat, I. 2022. *Analisis Laporan Keuangan*.

Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik lebih dapat dipercaya. Bagi perusahaan publik, seperti yang disebutkan sebelumnya, laporan keuangan akhir tahun adalah yang wajib diaudit.

Menurut Munawir (2007:2), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. IAI (2009:27) menambahkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian integral dari proses pelaporan keuangan, yan g biasanya mencakup n eraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (seperti laporan arus kas atau arus dana), serta catatan-catatan yang menyertainya.

Kasmir (2012) menegaskan bahwa dalam praktiknya, laporan keuangan ole h perusahaan tidak dibuat secara asal-asalan, tetapi harus disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku, agar mudah dibaca dan dipahami. Fahmi (2012:21) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai indikato r kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Secara keseluruhan, laporan keuangan memainkan peran penting dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan, memungkinkan berbagai pihak untuk melakukan analisis yang mendalam dan pengambilan keputusan yang tepat. Kualitas laporan keuangan yang baik tergantung pada ketepatan penyusunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang memastikan keandalan dan relevansi informasi bagi para pemangku kepentingan.

Laporan keuangan tentu wajib dan harus diperiksa aliran keuangannya. Auditor lah yang memeriksa laporan keuangan tersebut. Penting karena harus transparasi, artinya si audit mampu memastikan bahwa laporan tersebut akurat atau tidak. Maka dari itu berikut adalah penjelasan bagaimana seharusnya laporan keuangan itu di dalam suatu instalasi:

1. Transparansi keuangan mengacu pada penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas suatu instalasi terhadap pemerintah, kepatuhan instalasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas pengawasan publik terhadap pembangunan dan pelayanan. Transparansi keuangan adalah praktik yang memastikan informasi keuangan suatu instalasi, seperti perusahaan, pemerintah, atau organisasi non-profit, dapat diakses, terbuka, dipahami, dan diaudit oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Transparansi keuangan melibatkan penyajian informasi keuangan suatu instalasi yang akurat, jelas, rinci dan terbuka sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

   Transparansi Keuangan tentunya memiliki tujuan sebagai berikut:

   a) Membangun Kepercayaan: Transparansi membuat investor, karyawan, serta masyarakat umum merasa yakin bahwa instalasi mengelola dana secara bertanggungjawab.
   b) Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan menyediakan informasi yang terbuka, akurat dan terperinci membuat instalasi dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, sehingga lebih mudah bagi pihak eksternal maupun internal untuk memeriksa atau menilai kinerja laporan keuangan.

c) Mengurangi Korupsi dan Penyalahgunaan: Transparansi membantu meminimalkan risiko korupsi mulai dari penipuan, penyalahgunaan, atau penggelapan dana, karena segala transaksi yang terjadi dapat diaudit.
d) Memenuhi Kewajiban Hukum dan Regulasi: Banyak negara dan sektor industri memiliki peraturan yang mengharuskan instalasi untuk melaporkan informasi keuangan mereka secara transparan dan terbuka.

Manfaat Transparansi Keuangan :

a) Meningkatkan Nilai suatu Instalasi: Laporan keuangan instalasi yang transparan cenderung lebih dipercaya oleh investor, yang dapat meningkatkan nilai saham dan keuntungan yang mereka dapat.
b) Memperkuat Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Transparansi bisa membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal yakni pemegang saham, mitra bisnis, dan masyarakat.
c) Mempermudah Akses ke Pembiayaan: Lembaga keuangan dan investor lebih cenderung mendukung organisasi yang transparan karena mengurangi risiko ketidakpastian.
d) Memungkinkan Perencanaan dan Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data laporan keuangan yang jelas dan akurat dapat membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan yang tepat.

UU 17/2003 menekankan bahwa transparansi adalah prinsip penting dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pemerintah harus terbuka dalam mengelola dan melaporkan keuangan negara. Penyampaian laporan keuangan kepada publik adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas. Untuk mendukung ini, ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.[7] Transparansi keuangan merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi instalasi di era modern, baik untuk kepatuhan dalam hukum maupun untuk membangun instalasi dengan citra yang positif.

2. Pencegahan kecurangan, artinya diperiksa agar mengetahui bahwa terjadi fraud atau tidak, sehingga proses audit berjalan disitu. Proses audit tersebut bisa mengidentifikasi serta mencegah terjadinya kecurangan. Dalam audit penting untuk menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan.

   Tindak Audit yang harus dilaksanakan di dalam suatu instalasi adalah sebagai berikut:

   a) Audit Internal secara Berkala: Melakukan audit internal berkala secara rutin untuk menilai efektivitas serta memastikan tidak adanya kecurangan.
   b) Rotasi Auditor: Melakukan rotasi auditor eksternal untuk mengurangi risiko dari kolusi antara auditor dan pihak yang diaudit.
   c) Pengawasan oleh Komite Audit: Komite audit yang independen dapat memberikan pengawasan ketat dan mencegah potensi terjadinya konflik kepentingan.
3. Ketika menyusun laporan keuangan, auditor memastikan lembaga mematuhi aturan di Indonesia, termasuk standar PSAK. Kepatuhan berarti tunduk pada perintah atau aturan.

[7] Salle, A. 2017. *Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah, 1(1).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang "Peraturan Pasar Modal" mengatur bahwa perusahaan publik di Indonesia haru s tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Menurut BAPEPAM dan LK, setiap perusahaan publik harus mengirimkan laporan tahunan dengan laporan keuangan auditor independen palin g lambat 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.[8] Teori kepatuhan membantu individu atau kelompok untuk lebih mematuhi peraturan. Instalasi yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu melakukannya karena kewajiban dan juga manfaat besar bagi pengguna laporan keuangan atau investor.

4. Pengurangan risiko, Menurut Messier et al. (2 014), Risiko Audit adalah risiko bahwa auditor akan mengeluarkan laporan wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Auditor harus melakukan audit untuk mengurangi risiko audit hingga tingkat yang cukup rendah untuk memberikan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan. Menurut Elder, et al. (2012:270-274) ada empat risiko audit, yaitu :
   a) Risiko Deteksi yang direncanakan (*Planned Detection Risk*)
      Risiko deteksi yan g direncanakan adalah risiko bahwa bukti audit tidak akan menemukan salah saji yang melebihi batas yang dapat diterima. Risik o ini menentukan jumlah bukti substantif yang dikumpulkan oleh auditor; semakin kecil risiko yang direncanakan, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan audito r untuk mencapai pengurangan risiko yang diinginkan.
   b) Risiko Bawaan (*Inherent Risk*)
      Risiko bawaan mengukur kemungkinan adanya salah saji material (baik karena kecurangan atau kesalahan) dalam sebuah bagian audit sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian interna l klien. Jika auditor menilai kemungkinan salah saji tinggi tanpa mempertimbangkan pengendalian internal, maka risiko bawaan dianggap tinggi. Pengendalian internal diabaikan saat menetapkan risiko bawaa n karena dianggap terpisah dari model risiko audit sebagai risiko pengendalian.
   c) Risiko Pengendalian (*Control Risk*)
      Risiko pengendalian mengukur apakah auditor menilai pengendalian internal klien mampu mencegah atau mendeteksi salah saji yang melebihi batas yang dapat diterima dengan tepat waktu.
   d) Risiko Audit yang Dapat Diterima (*Acceptable Audit Risk*)
      Risiko audit yang dapat diterima mengukur seberapa siap auditor menerima kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan setelah audit selesai dan opini wajar tanpa pengecualian diterbitkan. Jika auditor memilih risiko audit yang lebih rendah, mereka ingin memastikan tidak ada salah saji dalam laporan keuangan. Risiko nol adalah kepastian, dan risiko 100 persen adalah ketidakpastian mutlak. Risiko audit terjadi jika auditor tidak memodifikasi pendapatnya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material.

[8] Annisa, D. 2018. *Pengaruh ukuran perusahaan, jenis opini auditor, ukuran KAP dan audit tenure terhadap audit delay*. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 1(1), 108-121.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Risiko audit terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi (Mulyadi, 2014). Audit membantu mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk penjualan, pemasukan kas, dan pengelolaan keuangan yang baik.

5. Meningkatkan efisiensi, temuan auditor bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, misalnya jika biaya operasional terlalu tinggi lalu bagian keuangan atau manajer memanipulasi biaya, seperti biaya penyusutan mesin atau biaya penyusutan gedung / kendaraan, maka dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu diperlukannya audit di dalam kegiatan operasional tersebut untuk meminimalisir manipulasi dalam biaya suatu produksi barang.

Anggraini (2008) menyatakan bahwa auditor internal berperan penting dalam pengendalian internal dan kinerja perusahaan. Tugas auditor internal mencakup evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal yang disusun oleh manajemen. Pengendalian internal meliputi Audit Internal dan Pencegahan Fraud. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap transaksi dan kegiatan, serta pengawasan pelaksanaannya di semua lini perusahaan, menjadi tanggung jawab Tim Pengawas Internal yang menjalankan fungsi audit internal. Fungsi ini mencakup pengawasan penerapan SOP, melakukan review, memberikan rekomendasi jika ada ketidaksesuaian, dan memantau pelaksanaannya. Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah fraud dengan memastikan setiap transaksi dan kegiatan sesuai SOP, dan semua pelaksana memahami tanggung jawab dan hak mereka.[9] Dengan adanya tim audit maka kinerja suatu instalasi akan menjadi lebih baik. Dan membuat manajer serta karyawan bekerja sesuai dengan jobdesk. Ketika ada pengawas dari bagian internal dan eksternal tentunya akan meningkatkan kinerja manajer serta karyawannya.

Audit adalah salah satu langkah untuk mencegah korupsi dalam suatu instalasi. Meskipun demikian, fraud masih bisa terjadi meskipun telah ada audit, dan lebih mungkin terjadi jika tidak ada audit sama sekali. Survei Fraud Indonesia (SFI) tahun 2019 menunjukkan bahwa 64,4% kasus fraud di Indonesia adalah korupsi.[10] Seorang akuntan harus mampu melihat, menganalisis, dan menginformasikan kepada instalasi agar tidak terjadi fraud dalam kegiatan mereka dan menghasilkan bukti. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. [11] Audit sangat bergantung pada bukti yang ditemukan auditor dalam laporan keuangan yang diperiksa. Bukti audit harus cukup dan tepat. Kecukupan bukti mengukur jumlah bukti dalam audit untuk mencegah fraud. Audit adalah langkah pencegahan korupsi dengan mendeteksi kecurangan dan mendorong transparansi. Auditor memiliki peran penting dalam upaya anti-korupsi, termasuk dalam beberapa aspek berikut:

a) Deteksi dan Pencegahan Kecurangan Auditor: bertugas untuk memeriksa dan menilai laporan keuangan serta sistem pengendalian internal. Dengan begitu,

[9] Anggraini, F. 2008. *Analisis Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Peningkatan Pengendalian Intern dan Kinerja Perusahaan.* Skripsi. UIN Syarih Hidayatullah Jakarta: Ekonomi dan Bisnis.

[10] Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. 2020. *Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Korups i* (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 10(4).

[11] Arum Ardianingsih, S.E., M.Acc., Ak.CA, *Audit Laporan Keuangan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hlm 4

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

auditor dapat mengidentifikasi tanda-tanda korupsi, seperti transaksi yang mencurigakan atau pencatatan yang tidak wajar. Kehadiran auditor juga dapat menjadi pencegah karena mereka meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi.

b) Evaluasi Pengendalian Internal: Auditor mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan atau organisasi. Pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya korupsi dengan memastikan adanya prosedur yang tepat untuk memonitor dan mengelola risiko, termasuk risiko korupsi. Auditor tentunya dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengendalian tersebut.
c) Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Anti-Korupsi: Auditor memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mematuhi peraturan serta kebijakan anti-korupsi yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun internasional. Mereka memeriksa apakah perusahaan telah mengikuti undang-undang anti-korupsi serta menerapkan kebijakan untuk mencegah korupsi di semua kegiatan operasional.
d) Menyediakan Laporan untuk Investigasi: Jika auditor menemukan bukti adanya peluang korupsi, mereka harus melaporkan hal yang mereka temukan tersebut kepada pihak yang berwenang atau manajemen senior. Dalam beberapa kasus, laporan audit dapat digunakan sebagai bahan investigasi lebih lanjut oleh otoritas hukum untuk mengungkap tindakan korupsi.
e) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Auditor memberikan laporan yang independen mengenai aliran keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap prosedur serta kebijakan yang ada. Laporan keuangan juga tentunya membantu memastikan transparansi operasional dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, sehingga mengurangi kemungkinan adanya korupsi. Akuntanbilitas, jadi di setiap laporan keuangan suatu instalasi, harus ada akuntanbilitasnya. Bagian manajer keuangan punya pertanggung jawaban atas semua dana atau uang yang keluar di perusahaan, karena jikalau tidak ada pertanggung jawaban, bagaimana nanti auditor akan memeriksa, pasti akan terjadi fraud yang sangat besar dan merugikan banyak pihak.

Contoh kasus: Terdakwa Len Aini Binti Zen Amin, bersama saksi Berry Yudanto, S.H., bin Bambang Sutejo, dan saksi Sar i Hastiati binti Syari'i diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang mereka miliki karena jabatan mereka. Mereka diduga melakukan penyimpangan uang tunjangan kinerja (T ukin) pegawai di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tahun 2021 hingga 2022, dengan total kerugian sebesar Rp.4.124.352.470 (empat miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh r upiah). Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan negara. Penyimpangan semacam ini tidak hanya merugikan negara dari segi finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi di masa depan.[12]

Terdakwa Wahid Maulana bin Juin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ia dinyatakan turut serta atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi secara berkelanjutan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian. Tindakannya ini diatur dan dikenai sanksi dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diuba h dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.[13]

Kejahatan yang dilakukan secara sengaja dan terencana mendapat hukuman lebih berat, termasuk kasus korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang terencana, dimulai sejak perencanaan dan penganggaran, dengan rekayasa administrasi dan keuangan yang didukung kebijakan atau peraturan agar terlihat legal. Korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri. [14] Dengan menjalankan fungsinya, auditor dapat membantu mendeteksi, mencegah, dan mengurangi praktik korupsi di organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Mereka berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih etis dan transparan. Serta dengan adanya tim auditor ini bisa meningkatkan prosedur di dalam kegiatan instalasi agar tidak terjadinya kecurangan, korupsi, manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat jabatan yang tinggi. Audit manajemen tidak hanya mengaudit keuangan saja, tetapi mereka bisa mengaudit kinerja karyawan atau bisa dibilang audit internal, tetap ada prosedurnya yakni SOP untuk melakukan pemeriksaan, supaya tidak terjadinya kecurangan dari unsur manapun. Baik unsur keuangan maupun non keuangan. Dengan adanya audit akan menyadarkan seluruh elemen di dalam instalasi untuk tunduk pada aturan.

[12] Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar lampung*: Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3. Perahu (Penerangan hukum): Jurnal Ilmu hukum, 12(1).

[13] Hartono, B., & Hasan, Z. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya* (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). IBLAM Law Review, 1(3), 1-21.

[14] Lestari, S. C., & Hasan, Z. 2022. *Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur*. Muhammadiyah Law Review, 6(1), 28-37.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 2 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

V. KESIMPULAN

Korupsi berdampak negatif pada pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika proyek ekonomi dicemari oleh korupsi (seperti suap dalam rekrutmen, nepotisme, penggelapan, dan lainnya), pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Pencegahan korupsi oleh auditor dimulai dengan pemeriksaan laporan keuangan instalasi yang memiliki kegiatan operasional. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan yang disengaja untuk keuntungan pribadi atau orang lain, termasuk penipuan, penyembunyian, atau penyelewengan dengan tujuan memperoleh keuntungan tidak sah. Peran audit internal semakin penting dan efektif dalam menilai risiko dan pengendalian internal, serta mencegah dan mendeteksi korupsi. Dengan pengelolaan audit internal yang baik, kompetensi dan independensi auditor yang terjaga, serta dukungan sumber daya yang tepat, peluang terjadinya korupsi bisa menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Annisa, D. 2018. *Pengaruh ukuran perusahaan, jenis opini auditor, ukuran KAP dan audit tenure terhadap audit delay*. JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 1(1), 108-121.

Anggraini, F. 2008. *Analisis Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Peningkatan Pengendalian Intern dan Kinerja Perusahaan*. Skripsi. UIN Syarih Hidayatullah Jakarta: Ekonomi dan Bisnis.

Arum Ardianingsih, S.E., M.Acc., Ak.CA, *Audit Laporan Keuangan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*: Bambang Hartono 1 Zainudin Hasan 2 Wilsa Syahira 3. Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 12(1).

Hartono, B., & Hasan, Z. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya* (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). IBLAM Law Review, 1(3), 1-21.

Iwan Koerniawan, S.E., M.Th., M.Si. *Auditing Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi*, Yayasan Prima Agus Teknik, Redaksi: Jln Majapahit No 605 Semarang 2021.

Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. 2017. *Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia*. Buletin Ekonomi FEUKI ISSN-14103842 Vol, 21, 50-58.

Lestari, S. C., & Hasan, Z. 2022. *Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur*. Muhammadiyah Law Review, 6(1), 28-37.

Rinaldi, R. P., & Supriyono, R. A. 2020. *Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Korupsi* (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 10(4).

Salle, A. 2011. *Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah, 1(1).

Sari, P. A., & Hidayat, I. 2022. *Analisis Laporan Keuangan*.

Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270, 2019.

Wahyudin, U. 2017. *Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(12), 147-161.

WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Wulandari, A., Putri, M. E., & Marlina, Y. 2021. *Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia*. Jurnal Akuntansi UMMI, 1(2), 66-82.

Wulandari, A., Putri, M. E., & Marlina, Y. 2021. *Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia*. Jurnal Akuntansi UMMI, 1(2), 66-82.